

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM KEBIJAKAN INDEKS DESA
MEMBANGUN DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT**

Alif Afadhil Ansani

NPP. 32.0973

Asdaf Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat

Program Studi Studi Kebijakan Publik

Email: alifafadhilansani23@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Mutiar Fitri Dewi, S.Pd, M.Hum

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The Village Development Index is a policy issued by the Ministry of Village Development of Disadvantaged Regions through Permendes PDTT Number 2 of 2016 concerning the Village Development Index to encourage the Acceleration of Achieving Sustainable National Development Goals at the Village level. Polewali Mandar Regency has 32 Independent Villages in 2024 out of 144 villages. However, there is still a development gap and a high poverty rate in Polewali Mandar Regency, which is 70.42 thousand people. **Purpose:** The purpose of this study is to determine and describe collaborative governance and supporting and inhibiting factors in the Village Development Index policy in Polewali Mandar Regency, West Sulawesi Province. **Method:** the research method used is a descriptive qualitative approach. The data collection techniques used are interviews, observations and documentation studies. The data analysis technique is by means of data reduction, data presentation, and drawing conclusions and triangulation. This study was analyzed based on the theory of collaborative governance according to Ansell and Gash which has dimensions of initial conditions, institutional design, facilitative leadership and collaborative processes. **Results:** The findings obtained by the researcher are the lack of coordination between the village government and the district government, the lack of the Polewali Mandar Regency APBD in providing assistance to villages so that they hope for assistance from the central government, each village only uses village funds for village development. **Conclusion:** Collaborative Governance in the village development index policy in Polewali Mandar Regency has been running but is not optimal. This can be seen from the initial condition dimension where there are no incentives obtained by stakeholders. The institutional design dimension, stakeholders expect each other and the lack of communication forums. The facilitative leadership dimension has been running quite well. However, the collaborative process dimension has not been achieved due to the lack of face-to-face dialogue, trust in each other, to the interim results which show that many villages are still not independent.*

Keywords: *Collaborative Governance, Village Development Index, Independent Village*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Indeks Desa Membangun merupakan kebijakan yang di keluarkan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal melalui Permendes PDTT Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun demi mendorong Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan di tingkat Desa. Kabupaten Polewali Mandar memiliki jumlah Desa Mandiri sebanyak 32 desa pada tahun 2024 dari 144 desa. Namun masih terdapat kesenjangan pembangunan dan tingginya penduduk miskin di Kabupaten Polewali Mandar yang berjumlah 70,42

ribu jiwa. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan *collaborative governance* serta faktor pendukung dan penghambat dalam kebijakan Indeks Desa Membangun di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. **Metode:** metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Adapun teknik analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta triangulasi. Penelitian ini dianalisis berdasarkan teori *collaborative governance* menurut Ansell dan Gash memiliki dimensi kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif dan proses kolaboratif. **Hasil/Temuan:** Temuan yang didapatkan oleh peneliti yaitu kurangnya koordinasi pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten, kurangnya APBD Kabupaten Polewali Mandar dalam memberikan bantuan kepada desa sehingga berharap bantuan dari pemerintah pusat, setiap desa hanya menggunakan dana desa untuk pembangunan desa. **Kesimpulan:** *Collaborative Governance* dalam kebijakan indeks desa membangun di Kabupaten Polewali Mandar sudah berjalan namun belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari dimensi kondisi awal yang dimana belum adanya insentif yang didapatkan oleh pemangku kepentingan. Dimensi desain kelembagaan, pemangku kepentingan saling berharap satu sama lain dan kurangnya forum komunikasi. Dimensi kepemimpinan fasilitatif telah berjalan cukup baik. Namun pada dimensi proses kolaboratif belum tercapai karena kurangnya dialog tatap muka, kepercayaan satu sama lain, hingga hasil sementara yang menunjukkan masih banyak desa belum mandiri.

Kata kunci: Collaborative Governance, Indeks Desa Membangun, Desa Mandiri

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah merupakan institusi sentral dalam sistem kenegaraan yang memiliki kewenangan penuh untuk membuat kebijakan dan mengelola berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pelaksanaan kebijakan yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan memastikan tata kelola yang baik merupakan fungsi utama pemerintah. Namun seiring perkembangan dunia yang setiap saat berubah maka tata kelola pemerintahan harus menyesuaikan dari perkembangan tersebut (Virginia, 2023). Konsep *collaborative governance* memungkinkan para *stakeholder* untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah. Hal ini terutama terkait pengembangan wilayah dan pembangunan berkelanjutan, yang diawali dengan perencanaan infrastruktur serta penguatan kerja sama antar *stakeholder* (Ode et al., 2022).

Indonesia memiliki permasalahan di berbagai sektor yang perlu diatasi bersama salah satunya masalah yang sangat kompleks yaitu di pedesaan. Desa menjadi prioritas dalam pembangunan nasional tetapi seringkali kurang mampu untuk berkembang dan hanya bergantung kepada negara. Hal ini sebagai tantangan terbesar oleh pemerintah yang dimana desa sebagai struktur terkecil dalam pemerintahan merupakan wilayah yang sangat strategis dalam rangka membangun perekonomian nasional yang tangguh (Surya et al., 2023). Sama halnya yang disampaikan oleh (Rahmah & Hamdi, 2021) bahwa desa sebagai institusi yang paling dekat dengan masyarakat dan menjadi leading sector pada level pemerintahan terendah untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 mencatat jumlah penduduk miskin Indonesia di pedesaan yaitu 13,58 juta dibandingkan dengan perkotaan yang berjumlah 11,63 juta. Maka dari perlunya pembangunan desa berkelanjutan agar dapat mengembangkan potensi yang dimiliki demi kesejahteraan masyarakat. Menurut (Prasetyo & Sonny, 2020) Meningkatkan jumlah desa yang maju akan mendorong tingkat ketimpangan antara desa dan kota menjadi lebih rendah. Kemudian Pengurangan kemiskinan akan berdampak pada perbaikan kondisi sosial rumah tangga di desa (Oktarina et al., 2023). Adapun Provinsi Sulawesi Barat memiliki

jumlah penduduk miskin sebanyak 162,19 ribu jiwa. Berikut jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Barat Per Kabupaten tahun 2024:

Tabel 1
Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024

Kabupaten (Perkotaan dan Pedesaan)	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)
Kabupaten Majene	24,41
Kabupaten Polewali Mandar	70,42
Kabupaten Mamasa	23,61
Kabupaten Pasangkayu	9,95
Kabupaten Mamuju Tengah	11,16
Jumlah (Perkotaan)	27,24
Jumlah (Pedesaan)	139,95

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024

Pada tabel 1 mengungkapkan bahwasanya jumlah penduduk miskin lebih banyak di Kabupaten Polewali Mandar berjumlah 70,42 ribu jiwa dan di wilayah pedesaan menunjukkan bahwa penduduk miskin lebih banyak jika dibandingkan dengan perkotaan dengan jumlah 139,5 ribu jiwa. Dalam hal ini perlunya perhatian khusus dalam upaya pembangunan desa yang diharapkan terciptanya desa mandiri baik dari segi ekonomi, memiliki ketahanan sosial yang kuat dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Kholipah et al (2024) menyatakan salah satu langkah penting dalam mencapai kemandirian desa dengan pengoptimalan sumber daya desa sebagai sumber nutrisi dan farmasi hidup dalam menciptakan desa mandiri secara pangan. Pengembangan ekonomi lokal juga merupakan salah satu langkah krusial dalam menciptakan kemandirian desa. Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan baik memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan desa (Virginia, 2023). Potensi lokal yang ada menawarkan kualitas ekonomi yang lebih baik tetapi dengan risiko dan biaya yang lebih rendah sehingga memberikan perencanaan yang lebih mudah (Wirahayu et al., 2022). Maka dari itu demi mendorong optimalisasi SDGs Desa (Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan di tingkat Desa) pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan membuat perangkat yang disebut dengan Indeks Desa Membangun (IDM) melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa

Membangun (IDM), yang memiliki 3 aspek pengklasifikasian menuju desa mandiri, yakni Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan. IDM digunakan sebagai dasar dalam melakukan afirmasi, integrasi, dan sinergi pembangunan pemerintah daerah dengan harapan terwujudnya kondisi masyarakat desa yang sejahtera, adil dan mandiri.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Permasalahan yang berkaitan dengan *collaborative governance* dalam kebijakan indeks desa membangun di Kabupaten Polewali Mandar yaitu berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 mencatat tingginya angka kemiskinan di pedesaan terkhusus pada Kabupaten Polewali Mandar menjadi tertinggi di Provinsi Sulawesi Barat dibandingkan dengan Kabupaten lain sebanyak 70,42 ribu jiwa. Adapun status indeks desa membangun di Kabupaten Polewali Mandar yang belum merata, masih terdapat kesenjangan pembangunan desa yang belum dikategorikan menjadi desa mandiri. Dari 144 desa. Desa yang memiliki sarana perdagangan akan memiliki nilai IDM yang tinggi jika dibandingkan desa yang tidak memiliki sarana perdagangan sesuai dengan aspek ekonomi (Lobwaer et al., 2024). Berikut status IDM Kabupaten Polewali Mandar per Kecamatan tahun 2024.

Tabel 2
Status IDM Kabupaten Polewali Mandar Per Kecamatan Tahun 2024

No	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA	STATUS IDM 2024					KETERANGAN
			MANDIRI	MAJU	BERKEMBANG	TERTINGGAL	SANGAT TERTINGGAL	
1	Tinambung	7	5	2	0	0	0	
2	Campalagian	17	8	8	1	0	0	
3	Wonomulyo	13	8	5	0	0	0	
4	Tutar	12	0	1	6	5	0	
5	Binuang	9	8	0	0	1	0	
6	Tapango	13	0	3	10	0	0	
7	Mapilli	11	1	8	2	0	0	
8	Matangnga	6	0	2	4	0	0	
9	Luyo	10	0	7	3	0	0	
10	Limboro	10	0	6	4	0	0	
11	Balanipa	10	2	3	5	0	0	
12	Anreapi	4	0	1	3	0	0	
13	Matakali	6	0	2	4	0	0	
14	Allu	7	0	3	4	0	0	
15	Bulo	9	0	1	6	2	0	
Jumlah		144	32	52	52	8	0	144

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar

Pada tabel diatas mencatat bahwa Kabupaten Polewali Mandar memiliki gambaran yang menarik tentang perkembangan desa dengan memiliki total 144 desa yang tersebar di 15 kecamatan. Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar desa di Polewali Mandar berada dalam kondisi yang cukup baik, dengan 32 status desa mandiri, 52 desa maju, dan 52 desa berkembang. Hal ini menggambarkan bahwa 94,4 desa telah mencapai perkembangan yang positif dalam melaksanakan kebijakan Indeks Desa Membangun. Namun, masih terdapat kesenjangan pembangun desa, terutama pada kecamatan yang belum memiliki desa mandiri seperti Tutar, Tapango, Matangnga, Luyo, Limboro, Anreapi, Matakali, Allu, dan Bulo. Sehingga hal ini menjadi suatu permasalahan yang memerlukan strategi pembangunan yang lebih

terarah dan merata untuk meningkatkan status desa untuk memperkecil pembangunan antar kecamatan dan mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Polewali Mandar.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu baik dalam konteks *Collaborative Governance* dan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

- A. Penelitian yang dilakukan oleh Nanik Mandasari pada tahun 2021 yang membahas tentang Analisis Faktor-Faktor Pembangunan Desa Dan Strategi Menuju Desa Mandiri di Desa Batang Sangi Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci (Mandasari, 2021). Persamaan penelitian ini terdapat pada pembahasan pengembangan desa mandiri serta metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Adapun perbedaannya yaitu lokasi penelitian dan perspektif dalam membahas pengembangan desa yaitu analisis dan strategi oleh Mareine Warouw.
- B. Penelitian yang dilakukan oleh Ni Nyoman et al pada tahun 2024 yang membahas tentang *Innovative Governance* Dalam Pengembangan Program Desa Mandiri Sebagai upaya Pembangunan Berkelanjutan Di Desa Bongkasa Pertiwi Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung (Ni Nyoman et al., 2024). Persamaan penelitian ini terdapat pada fokus penelitian yaitu pembangunan desa dan metode penelitian kualitatif. Adapun perbedaan penelitian ini yaitu lokasi penelitian dan teori yang digunakan yaitu *Innovative Governance* oleh Rogers.
- C. Penelitian yang dilakukan oleh Yoseph Molla et al pada tahun 2021 yang membahas tentang *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Kampung Wisata Praiijing Di Desa Tebara Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat (Molla et al., 2021). Persamaan penelitian ini yaitu teori yang digunakan yaitu *Collaborative Governance* oleh Ansell dan Gash serta metode penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian ini adalah lokasi penelitian dan fokus pembahasan yang berbeda yaitu terkait pengelolaan kampung wisata.
- D. Penelitian yang dilakukan oleh Aldi pada tahun 2024 yang membahas tentang Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Desa Mandiri di Desa Kabuna Kecamatan Kakuluk Mesa Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur (Aldi, 2024). Persamaan penelitian ini terdapat pada pembahasan tentang pembangunan desa dan metode penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian ini terdapat pada lokasi penelitian dan perspektif atau teori yang digunakan yaitu Tata Kelola Pemerintahan oleh Sedarmayanti.
- E. Penelitian yang dilakukan oleh Basir et al pada tahun 2021 tentang Evaluasi Implementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Dalam Mewujudkan Desa Mandiri di Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar (Basir et al., 2021). Persamaan penelitian ini terdapat pembahasan tentang pembangunan desa serta metode penelitian kualitatif. Adapun perbedaan penelitian ini yaitu lokasi penelitian dan teori yang digunakan yaitu Evaluasi program dalam mewujudkan desa mandiri.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, topik pembahasan penelitian ini yaitu *Collaborative Governance* dalam kebijakan indeks desa membangun di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Walaupun memiliki pembahasan yang sama terkait pembangunan desa dengan penelitian terdahulu namun pada penelitian ini lebih berfokus pada tata kelola kolaboratif yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam melaksanakan kebijakan Indeks Desa Membangun

yang memiliki 3 aspek yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan sebagai alat ukur untuk menentukan status desa dan berfokus pada satu desa yang berkategori mandiri, maju, dan berkembang sebagai perbandingan praktik kolaborasi. Penelitian ini menggunakan teori *Collaborative Governance* oleh Ansell dan Gash yang sama dengan penelitian Yoseph Molla et al., 2021 yang terdiri dari dimensi kondisi awal, design kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan hasil sementara akan tetapi pembahasan yang berbeda yaitu tentang pengelolaan kampung wisata.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan *collaborative governance* serta apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam kebijakan Indeks Desa Membangun di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat.

II. METODE

Metode penelitian terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berkaitan dengan masalah sosial dan kemanusiaan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok (Creswell, 2018). Sedangkan metode deskriptif adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, yang mengumpulkan data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka, seperti hasil wawancara, catatan lapangan, atau foto (Simangunsong, 2017). Dalam mendapatkan dan menghimpun data pada penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Menurut Hardani et al, (2020:121) data primer adalah data yang didapatkan secara observasi dan wawancara. Adapun data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti (Sugiyono, 2020:137). Setelah mendapatkan data penulis melakukan teknik analisis data kualitatif. Menurut Miles dan Huberman dalam Simangunsong (2017) memberikan penjelasan tentang analisis data kualitatif dilakukan secara konsisten hingga tuntas sehingga datanya sudah mulai jenuh melalui serangkaian tahapan diantaranya reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada hasil penelitian dan pembahasan ini penulis menganalisis Kebijakan Indeks Desa Membangun di Kabupaten Polewali Mandar dengan menggunakan perspektif *Collaborative Governance* menurut Ansell dan Gash (2008) yang menyatakan bahwa pada tata kelola kolaboratif terdiri dari 4 (empat) dimensi yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif.

3.1. *Collaborative Governance* Dalam Kebijakan Indeks Desa Membangun di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat

Dalam konteks pembangunan desa pasti memiliki hambatan atau kendala yang bisa disebut sebagai patologi pembangunan desa. Menurut (Nain, 2019:154) patologi pembangunan desa dimaksudkan sebagai penyakit yang terjadi dalam pembangunan desa. Patologi pembangunan desa berimplikasi dengan adanya kendala atau hambatan dalam pembangunan desa sehingga hasil yang dicapai kurang maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka demi mendorong pembangunan desa berkelanjutan, Penetapan status Desa dimanfaatkan sebagai instrumen koordinasi lembaga setingkat Kementerian, serta antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa dalam

melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya untuk kebutuhan pemetaan tipologi Desa dan penentuan prioritas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Retnowati et al., 2022). Oleh karena itu penulis melakukan penelitian kebijakan indeks desa membangun di Kabupaten Polewali Mandar dengan menggunakan teori *collaborative governance* menurut Ansell dan Gash.

A. Kondisi Awal

Menurut Ansell dan Gash, kondisi awal dalam teori *collaborative governance* merupakan dasar atau fondasi keberhasilan kegiatan kolaboratif yang dijalankan oleh setiap sektor. Kondisi awal ini menjadi titik permulaan dari pembentukan keputusan dan kebijakan berorientasi konsensus untuk melaksanakan kebijakan publik yang mengatur program-program publik. Konsep ini menggambarkan bagaimana kondisi awal memiliki tiga indikator untuk menjelaskan kondisi yang dimaksud yaitu, ketidakseimbangan sumber daya, insentif untuk berkolaborasi, serta sejarah konflik yang pernah terjadi sebelumnya. Pada indikator ketidakseimbangan sumber daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar mengenai kondisi sumber daya manusia belum cukup untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di desa. Hal ini menjadi dasar perlunya kerja sama dan berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam melaksanakan Indeks Desa Membangun. Berikut jumlah pegawai Dinas PMD Kabupaten Polewali Mandar.

Tabel 3
Jumlah Pegawai Dinas PMD Kabupaten Polewali Mandar

NO	Pendidikan Formal	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	S2	4	2	6
3	S1	9	10	19
4	SLTA	2	1	3
JUMLAH		15	13	28

Sumber : Dinas PMD Kabupaten Polewali Mandar, 2024

Dalam pelaksanaan kolaborasi dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Polewali Mandar pada indikator insentif didapatkan oleh para pemangku hanya dimiliki oleh desa sendiri dan masyarakat desa karena perangkat daerah hanya melakukan tugas pembinaan teknis dan bantuan kepada desa untuk membangun desanya sendiri. Kemudian pada riwayat konflik kerja sama di lingkup pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan tidak adanya konflik antar pihak pemerintah dengan pihak lain. Sehingga pada dimensi ini penulis menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kolaborasi untuk menyelenggarakan kebijakan indeks desa membangun sudah cukup baik.

B. Desain Kelembagaan

Struktur kelembagaan dalam tata kelola kolaboratif menitikberatkan pada prinsip-prinsip dasar yang membentuk legitimasi prosedural. Dalam konteks ini, kehadiran pemerintah sangat diperlukan sebagai pihak yang menyusun regulasi, ketentuan, dan kebijakan dengan pendekatan yang proaktif dan transparan (Ansell & Gash, 2008). Pada dimensi ini memiliki indikator pertama yakni partisipasi inklusif yang bertujuan untuk mengukur tingkat partisipasi dan keterlibatan para pemangku kepentingan dalam inisiatif kolaboratif. Berdasarkan hasil yang dilapangan menunjukkan bahwa telah terjadinya kontradiksi atas kesadaran tentang peran masing-masing pihak di dalam lingkup pemerintahan. Kolaborasi di internal *stakeholder* pemerintah Kabupaten Polewali Mandar tidak berjalan optimal karena kurangnya pihak yang mengambil peran aktif dalam mewujudkan kolaborasi indeks desa membangun. Pada indikator aturan dasar dalam pelaksanaan kolaborasi indeks desa membangun didasari pada Permendes PDTT No. 2 Tahun 2016 tentang IDM sebagai teknis pelaksanaan Indeks Desa Membangun. Adapun dalam bertukar informasi antar pemangku dilakukannya suatu forum komunikasi yang membahas Indeks Desa Membangun. Forum Komunikasi ini dilakukan pada musrenbang, dan rapat koordinasi dinas namun belum adanya forum khusus yang membahasa pengembangan strategi kolaboratif untuk meningkatkan IDM di Kabupaten Polewali Mandar. Indikator keterbukaan proses menjadi salah indikator penting untuk mengukur keberhasilan suatu kolaborasi. Menurut (Labolo et al., 2020) keterbukaan penyelenggaraan merupakan prinsip dasar pemerintahan. Transparansi kolaborasi dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dapat dilihat melalui suatu website terkait IDM yang dapat diakses baik pada tingkat kabupaten maupun nasional seperti portal satu data dan IDMKemendesa. Berdasarkan hasil analisis yang penulis lakukan terhadap keempat indikator dalam desain kelembagaan. Penulis memahami bahwa desain kelembagaan pada *collaborative governance* dalam penyelenggaraan Indeks Desa Membangun di Kabupaten Polewali Mandar belum optimal. Hal ini dapat dilihat pada ada dua indikator yang tidak memenuhi pada pelaksanaan kolaborasi ini yaitu partisipasi inklusif dan forum komunikasi.

C. Kepemimpinan Fasilitatif

Unsur kepemimpinan dalam konteks kolaborasi tidak hanya menjadi pemimpin formal dari pemerintahan, lembaga, atau organisasi. Setiap individu berpotensi menjadi pemimpin fasilitatif jika mampu menggerakkan, memfasilitasi, dan mendorong keberhasilan tujuan kolaboratif. Kebijakan Indeks Desa Membangun di Kabupaten Polewali Mandar tidak terlepas dari adanya peran pemimpin yang mampu menjadi fasilitator dan mengarahkan bagi setiap pihak pada kolaborasi ini. Dalam indikator manajemen yang cukup terhadap proses kolaborasi telah diatur pada Standar Operasional Prosedur Indeks Desa Membangun yang dikeluarkan oleh Kemendes PDTT dalam hal pengorganisasian dan Alur Pemuktakhiran Indeks Deesa Membangun tahun 2024 maka pemimpin dari setiap perangkat daerah telah mengatur anggotanya sesuai dengan aturan yang dibuat. Berikut Skema Pemuktakhiran Data Indeks Desa Membangun. Pada indikator pengelolaan kemampuan melaksanakan kredibilitas teknis, Dinas PMD dan Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar telah memberikan gambaran kepada setiap perangkat daerah dan pemerintah desa untuk melakukan tugasnya dalam hal meningkatkan desa menjadi mandiri dan mengurangi desa tertinggal. Selanjutnya dalam memastikan kolaborasi untuk membuat keputusan kredibel dan meyakinkan semua aktor dalam penyelenggaraan IDM di Kabupaten Polewali Mandar setiap pemimpin Organisasi Perangkat Daerah dan Balitbangren sebagai penghubung seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan pengklasifikasian Kemandirian Desa. Penulis memahami Pemimpin dalam memfasilitasi anggotanya untuk bekerja sama dengan serius dalam peningkatan desa mandiri sudah semaksimal mungkin. Akan tetapi para pegawai dan pemerintah desa tidak melakukan

inovasi dalam memanfaatkan dana desa untuk membangun desa sesuai dengan potensi desanya sendiri sehingga Indeks Desa Membangun dalam berkolaborasi belum optimal.

D. Proses Kolaboratif

Siklus kolaboratif ini terdiri dari beberapa tahap penting, yaitu: dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses kolaborasi, pengembangan pemahaman bersama, serta hasil sementara dari upaya kolaborasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah disepakati bersama (Ansell & Gash, 2008:16). Penyelenggaraan pembangunan desa dan masyarakat mandiri di Kabupaten Polewali Mandar telah melaksanakan dialog tatap muka dengan pemangku kepentingan sebagai langkah awal untuk kolaborasi. Namun yang penulis dapatkan di lapangan bahwasanya dialog tatap muka antar pemangku kepentingan belum maksimal. Kondisi ini karena semua pihak baik di tingkat Pemerintah Desa hingga Pemerintah Kabupaten saling mengharapkan untuk mengambil sikap aktif. Kemudian dalam membangun kepercayaan dalam proses kolaborasi terjadi kontradiksi antar Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa. Kolaborasi dan kepercayaan di Internal pemangku kepentingan pemerintah tidak berjalan optimal karena kurangnya pihak pemerintah yang mengambil peran aktif. Semua cenderung berjalan parsial, masing-masing hanya berjalan dalam koridor peran tanpa berupaya untuk meningkatkan kolaborasi di internal pemerintah. Indikator komitmen terhadap proses sendiri telah menunjukkan upaya dan usahanya dalam berkomitmen pada tindak kolaboratif ini, hanya perlu peningkatan kesadaran masing-masing individu untuk lebih memiliki rasa kepedulian dan tanggung jawab atas pembangunan desa di Polewali Mandar. Serta mengurangi ego sektoral dalam koordinasi antar lembaga pemerintah. Adapun indikator pemahaman bersama penulis dapatkan bahwa Setiap pemangku kepentingan memahami perannya masing-masing dalam melaksanakan tugasnya untuk berkolaborasi. Apalagi di Indeks Desa Membangun sudah jelas arahnya bagaimana mengukur untuk mewujudkan desa mandiri di Polewali Mandar. Indikator hasil sementara merupakan langkah penting menuju pencapaian pada tujuan akhir dengan memberikan tolok ukur bagi peningkatan kinerja dan efektivitas kerja tim di masa yang akan datang. Hasil sementara pada proses Indeks Desa Membangun di Kabupaten Polewali Mandar ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan setiap tahunnya. Progres IDM Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2020-2024 dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 4
Progres Status IDM Kabupaten Polewali Mandar
Tahun 2020-2024

Status desa	2020	2021	2022	2023	2024
Sangat tertinggal	0	0	0	0	0
Tertinggal	43	40	16	10	8
Berkembang	89	92	83	61	52
Maju	12	12	45	56	52
Mandiri	0	0	0	16	32

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar

Berdasarkan tabel diatas dalam penyelenggaraan Indeks Desa Membangun di Kabupaten Polewali Mandar telah berjalan sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya bahwa telah menunjukkan hasil yang baik, namun masih ada beberapa desa yang belum mencapai status mandiri sehingga masih adanya ketimpangan pembangunan antar desa. Hal ini menjadi tantangan bagi *stakeholders* untuk membuat pembangunan desa di Polewali Mandar dapat lebih merata dan berkelanjutan, sehingga dapat mencapai status mandiri dan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Berdasarkan hal tersebut peneliti menyimpulkan bahwa dimensi proses kolaboratif belum optimal.

3.2. Faktor Pendukung dan Penghambat *Collaborative Governance* Dalam Kebijakan Indeks Desa Membangun di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat

Pelaksanaan *collaborative governance* dalam kebijakan indeks desa membangun di Kabupaten Polewali Mandar memiliki beberapa faktor yang mendukung dan menghambat. Faktor pendukung dijadikan sebagai keuntungan dalam sebuah program yang dibuat yang diartikan sebagai adanya keberhasilan dari tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan pada fakta yang ada di lapangan terdapat faktor pendukung untuk melaksanakan kebijakan Indeks Desa Membangun di Kabupaten Polewali Mandar yaitu kerja sama setiap pemangku kepentingan. Peningkatan desa mandiri yang cukup signifikan tidak terlepas dari Kerja Sama Antar Pemangku di Kabupaten Polewali Mandar yang menilai bahwa kebijakan ini begitu penting untuk memberikan pembangunan desa berkelanjutan sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya faktor yang menjadi keuntungan pada kebijakan tersebut disebabkan oleh Dorongan dari Pemimpin. Penulis menilai bahwa berdasarkan pada temuan dilapangan jika para pemimpin di setiap instansi pemerintah telah memberikan dorongan dan motivasi agar pegawai mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan dimensi kepemimpinan fasilitatif yang dinilai sudah cukup baik. Adapun faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan *collaborative governance* dalam kebijakan indeks desa membangun yaitu Keterbatasan Anggaran. Kabupaten Polewali Mandar masih sangat bergantung pada pendanaan dari pemerintah pusat karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat minim. Selanjutnya yang menjadi faktor penghambat yang signifikan dalam *collaborative governance* untuk mendukung kebijakan indeks desa membangun yaitu keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dimana masih rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan teknis yang dimiliki aparatur desa di Kabupaten Polewali Mandar. Rendahnya Koordinasi Antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten merupakan salah satu kendala keberhasilan kolaborasi ini. Walaupun desa mandiri di Kabupaten Polewali Mandar sudah menunjukkan peningkatan yang lebih baik, namun pemangku kepentingan baik pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten saling mengharapkan untuk mengambil sikap aktif. Keseluruhan kondisi ini membentuk lingkaran permasalahan yang saling berkaitan dan menjadi tantangan fundamental dalam mewujudkan *collaborative governance* yang efektif untuk mencapai desa mandiri di Kabupaten Polewali Mandar

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian *collaborative governance* dalam kebijakan indeks desa membangun di Kabupaten Polewali Mandar telah berjalan namun belum optimal. Adapun beberapa temuan yang penulis dapatkan pada penelitian ini yaitu dengan adanya kebijakan Indeks Desa Membangun, setiap desa memiliki target pembangunan yang jelas untuk membangun desanya sesuai 3 (tiga) aspek IDM yaitu aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Sehingga setiap perangkat daerah dan pemerintah desa lebih mudah untuk melakukan perencanaan pembangunan di desa. Pembangunan desa di Kabupaten

Polewali Mandar lebih dititikberatkan kepada desa sendiri sebagai pihak yang secara langsung mengetahui potensi desanya. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar hanya memberikan pembinaan teknis kepada pemerintah desa dan tidak memberikan bantuan berupa anggaran kepada desa yang meminta bantuan karena kurangnya APBD. Hal ini menjadikan Desa Buku Kabupaten Polewali Mandar mendapatkan bantuan dari Kementerian Desa PDTT dalam mengembangkan desa wisata berupa pantai wisata tanjung Buku.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan, dan penulisan secara komprehensif pada bab sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan terkait dengan *Collaborative Governance* dalam Kebijakan Indeks Desa Membangun di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut :

1. *Collaborative Governance* dalam Kebijakan Indeks Desa Membangun di Kabupaten Polewali Mandar sudah berjalan namun belum optimal. Hal ini dapat diketahui berdasarkan analisis dengan menggunakan teori *Collaborative Governance* Ansell dan Gash (2008) yang memiliki 4 dimensi. Dimensi kondisi awal, pada indikator insentif menunjukkan tidak semuanya para pemangku yang terlibat mendapatkan keuntungan. Desain kelembagaan dinilai belum optimal karena pada indikator forum komunikasi dan partisipasi inklusif dimana para pemangku kurang aktif dan berharap satu sama lain dan forum komunikasi dilakukan hanya sekali dalam setahun pada Musrenbang. Kemudian dimensi kepemimpinan fasilitatif sudah berjalan cukup baik dengan memiliki pimpinan berintegritas yang dibutuhkan dalam proses kolaboratif ini. Pada dimensi proses kolaboratif sudah berjalan akan tetapi belum optimal, hal ini ditunjukkan dari beberapa indikator yang belum tercapai seperti kurangnya dialog tatap muka antar pemangku kepentingan, kurangnya kepercayaan antar pemangku kepentingan, hingga hasil sementara belum tercapai dengan ditunjukkan masih banyaknya desa yang belum dikategorikan mandiri.

2. Faktor Pendukung yang mempengaruhi Kebijakan Indeks Desa Membangun adalah setiap para pemangku kepentingan masih bekerja sama dan para pemimpin yang memberikan dorongan kepada pegawai untuk melaksanakan pengklasifikasian desa mandiri di Kabupaten Polewali Mandar. Adapun faktor penghambat yang menjadi pengaruh dalam kebijakan Indeks Desa Membangun di Kabupaten Polewali Mandar yaitu terbatasnya anggaran pemerintah daerah, kapasitas SDM yang kurang, dan rendahnya koordinasi antar pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada empat perangkat daerah dan tiga desa sesuai dengan nilai IDM tertinggi berdasarkan kategori desa mandiri, maju dan berkembang

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan kebijakan indeks desa membangun di Kabupaten Polewali Mandar untuk menemukan hasil yang lebih mendalam dan memberikan saran dan inovasi yang terbaik

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Allah Swt. yang memberikan kesehatan, kekuatan dan perlindungan kepada penulis, kepada orang tua penulis yang senantiasa mendoakan dan mendukung penulis, kepada Dosen Pembimbing yang selalu memberikan bimbingan, arahan,

informasi dan nasihat kepada penulis, Pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian tentang Indeks Desa Membangun terkhusus kepada informan yang telah meluangkan waktunya memberikan informasi kepada penulis, serta seluruh pihak yang membantu selama penelitian ini selesai.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Aldi. (2023). Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Desa Mandiri Di Desa Kabuna Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Institut Pemerintahan Dalam Negeri. <http://eprints.ipdn.ac.id/20034/>
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2024). *Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTg1IzI=/jumlah-penduduk-miskin-ribu-jiwa-menurut-provinsi-dan-daerah.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat. (2024). Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten. <https://sulbar.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDcwIzI=/jumlah-penduduk-miskin--september-2024.html>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Basir, Alkadafi, M., & Fithriyyah, M. U. (2021). Evaluasi Implementasi Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3Md) Dalam Mewujudkan Desa Mandiri Di Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *Jurnal EL-RİYASAH*, 11(2), 139. <https://doi.org/10.24014/jel.v11i2.12147>
- Creswell, J. W. C. J. D. (2018). Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. In *SAGE (Fifth)*. SAGE. <https://doi.org/10.4324/9780429469237-3>
- Hardani, Helmina Andriani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Ria Rahmatul Istiqomah, Roushandy Asri Fardani, Dhika Juliana Sukmana, N. H. A. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif. In *Revista Brasileira de Linguística Aplicada (Vol. 5, Issue 1)*.
- Kholipah, S. A., Zaenal Asikin, M., Mijoyo, M., Tarsini, I., & Khoerudin, M. (2024). Optimization of Natural Resources to Realize Community Welfare. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 5(2), 577–592. <https://doi.org/10.59141/jist.v5i2.910>
- Labolo, M., Rohmansyah, H., & Rumbekwan, M. (2020). Political Reforms and the Role of Parliament in Promoting Good Governance through the Integration of Religious Views in National Politics. *Talent Development & Excellence*, 12(1), 3324–3330.
- Lobwaer, A. K. R., Nursini, Anwar, A. I., & Suhab, S. (2024). *Village Development Index Behavior: A Review of Regional Attractiveness (Issue Icame 2023)*. Atlantis Press International BV. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-400-6_26
- Mandasari, N. (2021). Analisis Faktor-Faktor Pembangunan Desa Dan Strategi Menuju Desa Mandiri (Studi Kasus di Desa Batang Sangir Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci). *Jurnal Administrasi Nusantara*, 4(1), 62–72. <https://doi.org/10.51279/jan.v4i1.483>
- Molla, Y., Supriatna, T., & Kurniawati Affiliation, L. (2021). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Kampung Wisata Praiijng Di Desa Tebara Kecamatan Waikabubak Kabupaten Sumba Barat. Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa Akreditasi Jurnal Nasional Sinta, J.,
- Nain, U. (2019). Pembangunan Desa Dalam Perspektif Sosiohistoris. In M. Faisal (Ed.), *Garis Khatulistiwa (Anggota IKAPI Sulsel) (Vol. 01)*. Garis Khatulistiwa (Anggota IKAPI Sulsel).
- Ni Nyoman Citra Rahayu Trisna Ari Canti, K., Ketut Winaya, I., & Dewa Ayu Putri Wirantari, I. (2024). Innovative Governance Dalam Pengembangan Program Desa Mandiri Sebagai. In *IJESPG Journal (Vol. 2, Issue 1)*. <http://ijespgjournal.org>

- Ode, L., Islamy, S., & Andriani, D. R. (2022). Proses Collaborative Governace Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Administrasi Negara*, 28(1).
- Oktarina, S. D., Nasdian, F. T., Nurkhoiry, R., Aulia, R. U., & Sipayung, T. (2023). Oil-palm village vs non-oil palm village: Lesson learned from a mix method study involving village development index. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1220(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1220/1/012026>
- Prasetyo, A. D., & Sonny, E. (2020). The Analysis of Determinants of Developing Village Index in Indonesia. *The Asian Journal of Technology Management (AJTM)*, 13(2), 158–172. <https://doi.org/10.12695/ajtm.2020.13.2.5>
- Rahmah, M., & Hamdi, M. (2021). Penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat di Desa Cileles, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. *Civitas Consecratio: Journal of Community Service and Empowerment*, 1(2), 69–84. <https://doi.org/10.33701/cc.v1i2.1954>
- Retnowati, A., Maulya, G. D., & Fajar, K. I. D. (2022). Sustainable development from the view of village development index implementation at landslide prone area in kulonprogo. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1089(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1089/1/012083>
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Surya, A., . S., & Shaddiq, S. (2023). Village Development Study Based on the Developing Village Index in Bati-Bati District, Tanah Laut Regency. *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis*, 06(09), 4333–4343. <https://doi.org/10.47191/ijmra/v6-i9-50>
- Virginia, O. (2023). The Impact of the Existence of Village-Owned Enterprises (BUMDes) Business Sectors on Village Development in Indonesia. *International Journal of Current Science Research and Review*, 06(07), 5208–5220. <https://doi.org/10.47191/ijcsrr/v6-i7-135>
- Wirahayu, Y. A., Sumarmi, Utomo, D. H., & Handoyo, B. (2022). DEVELOPING A MODEL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) AT THE AGROPOLITAN-BASED ORO-ORO OMBO TOURISM VILLAGE. *Geojournal of Tourism and Geosites* , 42(2), 735–742. <https://doi.org/10.30892/gtg.422spl12-883>